PANDANGAN MASYARAKAT PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh :

Yahya Ahmadi

NIM: E74212068

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YAHYA AHMADI**

Nim : **E74212068**

Jurusan/Prodi : **Filsafat Politik Islam**

Program Studi : **S1**

Fakultas : **Ushuluddin dan Filsafat**

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Pada Calon Anggota Legislatif (Caleg) Perempuan PPP Di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Gresik**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Yang Menyatakan:

METERAI TEMPEL

TGL 20

C728DAFF708792023

6000

ENAM RIBU RUPIAH

YAHYA AHMADI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh :

Nama : **Yahya Ahmadi**

Nim : **E74212068**

Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KABUPATEN GRESIK**

Telah Diperiksa dan disetujui untuk dujikan.

Surabaya, 17 Juli 2019

Pembimbing,

Laili Bariroh, M.Si
NIP.197711032009122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Yahya Ahmadi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP.196409181992031002

Tim Penguji :
Ketua,

Laili Bariroh, M.Si
NIP.197711032009122002

Sekretaris,

Nur Hidayat Wahiduddin, MA
NIP.198011262011011004

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP.196909071994032001

Penguji II,

M. Anas Fahruddin, M.Si
NIP.198202102009011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : YAHYA AHMADI
NIM : E74212068
Fakultas/Jurusan : Filsafat Politik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : PANDANGAN MASYARAKAT PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KABUPATEN GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis

(Yahya Ahmadi)
Namaterangdantandatangan

Nama : **YAHYA AHMADI**

NIM : **E74212068**

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Pada Calon Anggota Legislatif (Caleg) Perempuan PPP Di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Gresik**

Dosen Pembimbing : **Laili Bariroh, M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang calon anggota legislatif perempuan PPP dalam pandangan masyarakat. Fokus penelitian adalah bentuk dukungan dan kendala dari masyarakat kepada caleg perempuan PPP di Dapil 1. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk dukungan dan kendala dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Temuan penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa calon anggota legislatif perempuan Dapil 1 Kabupaten Gresik, mendapatkan dukungan dari keluarga dan Partai. Di sisi lain, mereka juga menghadapi kendala berupa pandangan masyarakat yang bias gender. Pandangan tentang *stereotipe*, beban ganda, dan subordinasi pada masyarakat masih kental mewarnai, selain itu pola pikir masyarakat transaksional, juga ditemukan pandangan masyarakat tentang caleg, dilihat dari aspek kontribusi material yang didistribusikan oleh caleg kepada masyarakat, tanpa melihat aspek perbedaan gender.

Kata Kunci : Stereotipe, Double Burden, Marginalisasi Perempuan, Subordinasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

ABSTRAK iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

PERNYATAAN KEABSAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Konseptual 8

F. Telaah Pustaka 10

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 26

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Konsep Gender 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Gender Dan Politik 35

C. Perempuam Dalam Politik 36

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Umum

1. Sejarah Kabupaten Gresik 39
2. Letak Geografis Dan Demografi 41
3. Kondisi Sosial Keagamaan 43
4. Kondisi Sosial Politik 45
5. Perolehan Suara PPP 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hambatan Yang Dihadapi Caleg Perempuan PPP 48

B. Bentuk Dukungan Yang diperoleh Caleg Perempua PPP 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Caleg Parpol Dengan Suara Terbanyak Di Dapil 1 Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik 5

Tabel 1.2 : Nama-Nama Informan 19

Tabel 1.3 : Tanggal Wawancara 22

Tabel 3.1 : Daftar Dapil Dengan Jumlah Kursi Di Kab. Gresik 2019 46

Tabel 3.2 : Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Tahun 2014 46

Tabel 3.3 : Perolehan Suara Parpol Di Dapil 1 Kab. Gresik 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan di Indonesia sering dianggap sebagai pekerja domestik, karena sampai saat ini budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Budaya patriarki tersebut menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang di sektor publik.[1] Di Jawa Timur, budaya patriarki masih sangat dominan dan sangat jelas terlihat dalam kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun dibidang politik. maka keberadaan mereka dalam dunia politik di Indonesia menjadi sebuah proses yang cukup lama.[2]

Menurut UNDP Indonesia, meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka bagi perekonomian nasional maupun rumah tangga, sebagian besar perempuan masih tidak dilibatkan dalam berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat maupun tingkat negara.

Peran perempuan dan politik tentunya tak lepas dari pandangan dan kontruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Pandangan yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep *stereotipe* tentang perempuan, utamanya dalam sektor politik dan pemerintahan. *stereotipe*

---

[1] Hesti A. dan Dian N, *Menggugat Hak Politik Perempuan* (Jakarta: KSP, Oktober 2005) Hal 3

[2] Ibid Hal 87-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kemudian menjadi pandangan bahwa perempuan tidak layak memimpin, karena mereka tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang berasal dari *stereotipe* tersebut yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender, sehingga peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik.

Berdasarkan data dari UNDP Indonesia, sejak tahun 2004 hingga 2014 keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 26,52%, sedangkan laki-laki mencapai 73,48%. Data itu memperlihatkan bahwa kuota perempuan yang ada di DPR RI masih sangat sedikit dan belum mencapai kuota 30% sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pada data yang ada, banyak laki-laki yang mendominasi kursi di DPR RI. Dominasi laki-laki dalam dunia politik inilah yang berakibat perempuan kurang mendapat perhatian dalam berbagai bidang karena kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.[3]

Rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik disebabkan masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, di mana sistem dan struktur sosial yang berbudaya patriarki telah memposisikan perempuan pada tempat yang tidak sejajar dengan kaum laki-laki. Menurut Syaikhu Busiri, anggota DPRD Gresik, saat ini jabatan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan jabatan Ketua Rukun Tetangga masih didominasi kaum laki-laki, padahal untuk membangun negara juga perlu

[3] UNDP, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan", *Makalah Kebijakan*, Jakarta, Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan perempuan, dan cara pandang tersebut harus selalu disuarakan sesuai UU NO 4 tahun 2012.[4]

Kurangnya jumlah perempuan yang aktif terlibat dalam dunia politik dan minimnya wawasan perempuan tentang politik, serta dorongan partai politik yang belum maksimal terhadap perempuan membuat perempuan lemah di bidang perpolitikan. Walaupun ada ruang dan harapan bagi perempuan untuk aktif melibatkan diri dalam dunia politik, utamanya menjadi calon legislatif, tetap saja peluang tersebut bergantung pada pimpinan partai politik, karena pimpinan-pimpinan partai politik tersebut lah yang berkuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.[5]

Perempuan yang aktif di dunia publik khususnya di dunia politik sering mendapat hambatan, baik itu di ruang lingkup domestiknya maupun di ruang lingkup publik. Hambatan itulah yang membuat kebanyakan perempuan merasa berat dan tidak ingin berkiprah di bidang politik walaupun banyak dukungan yang menguatkan mereka. Padahal sesungguhnya, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesamaan hak dalam berkarya di bidang politik.[6] Ainul Farosida, pengurus Fatayat NU yang juga kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyah yang ada di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa peranan perempuan harus ditingkatkan dan digerakkan dalam menunjang pembangunan, khususnya pada peningkatan perekonomian

---

[4] Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015

[5] Rosidawati, Imas. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik*. 2004

[6] Hesti A. dan Dian N, *Menggugat Hak Politik Perempuan* (Jakarta: KSP, Oktober 2005) Hal 83-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, sehingga bangsa Indonesia segera bangkit dari keterpurukan, dan bahwa perempuan berhak untuk menjadi Kepala Daerah ataupun Ibu Rumahtangga yang berpengalaman dan kreatif.[7]

Namun, budaya patriarki yang memandang lemah perempuan berakibat peran perempuan di bidang politik terpinggirkan. Anggapan lemah itulah yang menjadikan keterwakilan perempuan di partai politik kurang diminati baik di tingkat kabupaten, daerah, ataupun di tingkat provinsi sekalipun.[8]

Keterwakilan perempuan yang rendah berpengaruh dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik dan berdampak pada pembuatan kebijakan ekonomi dan sosial yang kemudian lebih memberikan keistimewaan terhadap cara pandang dan kepentingan-kepentingan kaum laki-laki, serta permodalan sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum laki-laki.

Berbagai kendala dan permasalahan yang telah teruraikan di atas yang menghambat gerak perempuan dalam berpolitik banyak terjadi di Gresik. Di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, terdapat beberapa perempuan yang berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2019. Data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) menunjukkan, dari 83 calon legislatif yang diusung 15 partai, yang mewakili dapil 1 Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik,

---

[7] Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015

[8] Siti Nimrah dan Sakaria, “Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik”, *Jurnal The Politik*, UNHAS, Vol 1,No 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada 35 calon legislatif perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2019.

Kendala juga datang dari parpol pengusung yang setengah-setengah dalam mengusung nama perempuan, hanya sekedar untuk melengkapi syarat dan untuk mengisi 30 persen ruang keterwakilan perempuan agar lolos verivikasi KPU.

Tabel 1.1 Daftar Caleg Parpol Dengan Suara Terbanyak Di Dapil 1 Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik[9]

NO.	PKB (20.128 suara)	Gerindra (18.022 suara)	PAN (13.678 suara)	Golkar (11.922 suara)	PPP (9.256 suara)
1	Syaikhu Busiri	Anang Yahya	Mubin	Ahmad Nurhamim	Hj. Lilik Hidayati
2	H. Chusni Thamrin	Markasim Halim Widianto	Didik Widodo	Erry Sucahyo	Nur Azizah Febriyanti
3	Hamidah Handayani	Munawarah	Asmaul Chusna Ike Wahyuni	Herawati	Siti Munawaroh
4	Septrianto Maulana	Dwi Laksono	Wahyani Ahmad	Yahya Rachmadin	Mochammad Hasan
5	Mufidatul Ummah	Yeni Yulianti	Agustina Sumarti	Kholid	Maksum
6	Jazilatur Rohmah	Dwi Cahyati	Yuwanita Tri Wijayanti	Lutfiyah	Zainal Abidin
7	Chusaini	H. Syafiqi M. Zain		Nor Farida	Abdul Wahab

Hal tersebut dapat diamati dari cara parpol memberikan nomor urut untuk caleg perempuan, dan dari 15 parpol pengusung hampir semuanya tidak ada yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 dan 2. Hanya

[9] Surabaya.tribunnews.com-Hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Gresik, sabtu 4 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parpol PPP yang dengan percaya diri menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan.

Di dunia politik, fenomena Bias gender, marjinalisasi, dan kurangnya dukungan masyarakat pada perempuan adalah sebuah ironi tersendiri. Keberanian parpol PPP dalam menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan seolah menentang *stereotipe* terhadap perempuan dan budaya patriarki, yang menjadi anomali karena berbeda dengan parpol pada umumnya, maka menjadikan topik permasalahan tersebut akan sangat menarik sebagai kajian skripsi, ditambah dengan pernyataan seorang perempuan pengurus organisasi perempuan Fatayat NU yang juga kepala sekolah salah-satu MI dalam Kecamatan kebomas, yang mengatakan bahwa peningkatan perempuan sangat penting, menjadikan pembahasan tentang perempuan masih penting untuk diperbincangkan dan diteliti. Peneliti mengambil topik penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang didapat oleh caleg perempuan dari parpol PPP di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, dan hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari parpol PPP dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, peneliti mengambil kasus yang ada ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 KABUPATEN GRESIK"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana bentuk dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Alasan di lakukannya penelitian ini memunyai tujuan yaitu untuk :

Mengetahui bentuk dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis

1. Secara Teoritis

a. Bahan untuk memperkaya referensi tentang permasalahan gender yang terdapat dalam masyarakat dikaitkan dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

b. Bahan untuk kajian lanjutan tentang isu gender dalam proses sosialisasi dan dapat menjadi sumbangan bagi khasanah kepustakaan.

2. Secara Praktis

a. Bahan untuk membuka wawasan masyarakat tentang fenomena gender dalam proses sosialisasi.

b. Dapat dijadikan salah satu masukan bagi partai politik agar dalam menentukan calon legislatifnya juga memperhatikan kehidupan kaum perempuan agar lebih berkeadilan gender

E. Definisi Konseptual

Guna menjelaskan penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini maka perlu adanya batasan istilah yang meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Caleg Perempuan PPP**

Caleg (Calon Legislatif) perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah caleg perempuan yang telah memenuhi syarat oleh peraturan yang diajukan oleh parpol PPP untuk menjadi anggota legislatif (DPRD) dengan mengikuti pemilihan umum yang ditetapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai caleg tetap pada pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

Peneliti memilih caleg perempuan dari parpol PPP karena dari 15 parpol yang mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihan I Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, hanya parpol PPP yang menempatkan semua caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan. Hal tersebut menjadikan peneliti merasa tertarik untuk memahami bagaimana dukungan yang didapat dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP.

2. **Pemilu Legislatif**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat Kabupaten di Kabupaten Gresik pada tahun 2019.

F. Telaah Pustaka

Guna memperkuat penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suciptaningsih dalam *Jurnal Komunitas* tentang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan konsep kemitrasejajaran dalam teori kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal masih sangat rendah, karena dari 45 orang anggota dewan legislatif, hanya empat orang saja yang perempuan.[10]

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian dari Suciptaningsih yaitu sama-sama mengkaji tentang perempuan dalam politik. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Suciptaningsih menggunakan konsep kemitrasejajaran dalam teori kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, maka penelitian ini menggunakan konsep gender dan *gender inequalities*. Fokus dari penelitian Suciptaningsih berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Fokus penelitian dari Suciptaningsih terletak pada partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan di lembaga legislatif di

[10] Suciptaningsih, O. A, "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal". *Jurnal Komunitas*, 2010, Vol. 2 No. 2. Hal. 66-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik dan bentuk dukungan yang diperoleh serta kendala yang dihadapi caleg perempuan, dipastikan tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Suciptaningsih.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahid dalam *Malaysian Journal of Communication* mengenai perempuan dan kekuasaan politik dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang memfokuskan diri pada pemahaman politik dan perempuan sebagai kandidat politik. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan dan hegemoni realiti politik perempuan, serta feminis radikal.[11] Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan dalam politik di Provinsi DKI Jakarta masih sangat sedikit dibanding dengan kaum laki-laki yang selama ini mendominasi politik, bahkan perempuan belum pernah ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik sebagai kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Penelitian dari Wahid memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahid dalam jurnalnya adalah dalam teori yang digunakan, Wahid menggunakan teori komunikasi politik dengan metode *feminist research*. Sementara

[11] Wahid, U. (2013). "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012". *Malaysian Journal of Communication. Vol. 29 issue 1*, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang peneliti lakukan konsep gender dan *gender inequalities*. Penelitian ini juga memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan, dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahid lebih fokus untuk mendeskripsikan tentang perempuan dan kekuasaan politik di DKI Jakarta.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Astuti dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* mengenai citra perempuan di dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan konsep gender dan *stereotip*e. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosok perempuan dalam politik masih dikaitkan dengan budaya patriarkhi. Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang memengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, sehingga, untuk terjun di dunia politik, perempuan masih saja menemui berbagai macam hambatan.[12]

Penelitian dari Astuti memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan, perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian dari Astuti tersebut terletak pada fokus dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Astuti lebih

[12] Astuti, T. M. P. 2008. "Citra Perempuan Dalam Politik",*Studi Gender Dan Anak*. Purwokerto: YIN YANG, Vol 3, No 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus untuk mendeskripsikan citra perempuan dalam politik, maka penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada konsep yang digunakan oleh Astuti yang menggunakan konsep gender dan *stereotipe* untuk mengkaji penelitiannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan konsep gender dan *gender inequalities*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Idris (2010) dalam *Jurnal Humaniora* mengenai Perempuan Minangkabau dalam politik. Hasil penelitian dari Idris ini menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik bagi Perempuan Minangkabau masih sangat kecil, tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan *affirmative action* dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat.[13]

Penelitian dari Idris (2010) memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian. Jika peneliti meneliti tentang partisipasi politik caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan konsep gender dan *gender inequalities*, maka Idris dalam penelitiannya ini meneliti tentang Perempuan Minangkabau dalam politik dengan teori struktural-fungsional dari Talcott Parsons.

[13] Idris, N. "Perempuan Minangkabau Dalam Politik", *Jurnal Humaniora*, Vol 22, No 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Alif Hidayati (2014), dalam tulisanya mengenai implementasi keterwakilan anggota legislatif perempuan yang belum bisa memenuhi kuota 30% dan kaitannya dengan hukum syari'at Islam, penelitiannya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam dunia politik tidak bertentangan dengan syariat Islam selama perempuan tersebut memiliki kapasitas dan kecakapan dalam bidang tersebut, namun kondisi sosial budaya dan keagamaan Masyarakat yang patriarki menjadi hambatan yang cukup besar ditambah dengan hambatan lain seperti keadaan ekonomi perempuan tersebut, rumitnya sistem pemilu dan kurangnya dukungan dalam bentuk legislasi.[14]

Penelitian Alif Hidayati tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam politik, perbedaanya adalah penelitian Alif Hidayati berfokus pada implementasi pemenuhan kuota 30% dan keterkaitannya dengan hukum syariat Islam, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mendeskripsikan bagaimana caleg perempuan dalam pandangan Masyarakat.

[14] Hidayati, Alif, "Implementasi Kuota 30% calon anggota legislatif perempuan di gresik pada pemilu tahun 2014", *Al Daulah*, Vol 4, No 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.[15] Penggunaan pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, bentuk dukungan yang diperoleh calon legislatif perempuan dan kendala yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan dalam partisipasinya pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti secara langsung untuk mengadakan hubungan dengan informan, baik informan utama maupun informan pendukung agar lebih mendalam dalam menggali informasi untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Berawal dari ketertarikan peneliti terhadap cara penomor-urutan parpol PPP untuk caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara

[15] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berurutan dari 7 caleg yang terdaftar, hal tersebut terjadi di Dapil 1 Kecamatan Gresik dan Kecamatan kebomas pada pemilihan umum DPRD Gresik 2019. Dari 15 parpol pengusung hampir semuanya tidak ada yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 dan 2. Hanya parpol PPP yang dengan percaya diri menempatkan caleg perempuan pada nomor-nomor strategis dan hal tersebut membuat peneliti merasa perlu untuk menjadikan Dapil 1 berserta fenomena yang ada perlu untuk diteliti.

Mengenai lokasi penelitian yang agak luas karena Dapil 1 melingkupi dua kecamatan, peneliti merasa perlu untuk meneliti keduanya, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas dikarenakan tempat tinggal 1 caleg perempuan berada di Kecamatan Kebomas Kelurahan Kawisanyar, dan 2 caleg perempuan lainnya tinggal di Kecamatan Gresik di Kelurahan yang berbeda.

Adanya pernyataan seorang perempuan pengurus Fatayat NU yang juga kepala sekolah salah-satu MI dalam Kecamatan Kebomas, bahwa peningkatan status dan taraf hidup perempuan adalah sangat penting, memperlihatkan bahwa pembahasan tentang perempuan masih penting untuk diperbincangkan dan menandakan bahwa pemikiran perempuan di daerah tersebut sudah lebih maju. Hal tersebut menjadi nilai tambah mengapa Dapil 1 layak untuk dijadikan lokasi penelitian.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen dan lain-lain.[16] Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti akan langsung memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait sesuai dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini informan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan teknik *purpossive sampling*, yakni teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling menguasi tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[17]

Pertama, informan yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat Kebomas, informan yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam masyarakat. Kedua, informan yang berasal dari masyarakat yang

[16] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000).
[17] Sugiono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal caleg-caleg perempuan tanpa memandang hubungan kekeluargaan yang bertempat tinggal di Kecamatan Gresik maupun Kecamatan Kebomas, ketiga, informan yang berprofesi sebagai guru, aktifis atau anggota partai politik yang tinggal atau berdinas di wilayah Dapil 1, dan informan yang keempat adalah caleg perempuan yang mencalonkan diri di wilayah Dapil 1 dari parpol PPP .

Informan diatas dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Semua informan yang telah dipilih dianggap paling memahami masalah pokok penelitian sehingga Peneliti memperoleh data sesuai harapan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dan dokumen-dokumen penunjang sumber primer untuk melengkapi data, baik dari Kecamatan maupun dari media massa, yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain koran, *browsing*, internet, foto, buku, dan jurnal berkaitan dengan profil Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

4. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Maka pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel. Sumber data lapangan pada penelitian kualitatif disebut informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian merujuk pada orang atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian atau informan tersebut yang akan menjadi sumber data yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.[6]

Dalam menentukan informan atau subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti telah menentukan sumber data atau informan dengan pertimbangan tertentu.[7] Pertimbangan tertentu misalnya informan tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia memiliki kedudukan atau ketokohan sehingga akan memudahkan peneliti menelusuri obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.2 Nama-Nama Informan

No.	Nama Informan	Profesi	Keterangan
1.	Ibu Lilik H.	Anggota DPRD	Caleg No 1 (*incumbent*)
2.	Ibu Siti M.	Pengajar	Caleg No 3
3.	Ibu Ainul F.	Kepala MI	Mantan Caleg
4.	Bpk. Agus S.	Ketua RT	Tokoh Masyarakat
5.	Bpk. Siswanto	Ustd/Pengajar	Tokoh Agama
6.	Bpk. Abd Rohman	Ustad/Dosen	Tokoh Agama
7.	Bpk. Dimyati S.	Ta'mir Masjid	Warga kec. Gresik
8.	No Name 1	Wiraswasta	Warga kec. Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Bpk. Susilo U.	Pedagang	Warga kec. Gresik
10.	No Name 2	IRT	Warga kec. Kebomas
11.	KH Umar T	Ustd/Kyai	Tokoh Agama
12.	No Name 3	Supir	Warga kec. Kebomas

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah untuk mengumpulkan informasi tentang siapa sajakah caleg perepuan yang tinggal dan menjadi peserta pemilu DPRD di Dapil 1 Kabupaten Gresik, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

Dalam observasi ini dibutuhkan kemampuan peneliti secara optimal agar dapat berpartisipasi di lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Maka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi dengan bertanya pada masyarakat, mengamati poster, banner dan media kampanye lainnya, serta melakukan pengamatan melalui media online seperti berita online dan situs KPUD Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan atau pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan fungsi yaitu mengadakan pengamatan.[18] Data yang ingin diperoleh dari observasi yakni mengenai caleg perempuan yang menjadi peserta pemilu dan bagaimana kondisi sosial masyarakat di Dapil 1.

b. Wawancara

Wawancara sangat penting di dalam penelitian ini, karena dengan wawancara kita berinteraksi langsung dengan informan dan peneliti secara langsung memperoleh informasi dan data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh kelengkapan data tentang hal-hal yang ingin diteliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan yang tinggal di Kecamatan Gresik-Kebomas atau Dapil 1, juga dengan cara berkomunikasi melalui media Whatsapp karena beberapa informan tidak dapat melakukan wawancara langsung disebabkan kesibukan yang sangat padat. Dalam lapangan peneliti juga kesulitan untuk menemui dan menghubungi caleg no 2 yaitu Azizah Febrianti, maka dalam penelitian ini caleg no 2 tidak dapat dijadikan informan. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai tanggal 14 Mei 2019 sampai 18 Juli 2019, dan waktu penggalian data disesuaikan dengan kesanggupan informan

[18] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000), Hal 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan waktunya untuk melakukan wawancara. Berikut adalah catatan waktu dilakukannya penggalian data dengan informan.

Tabel 1.3 Tanggal Wawancara

No.	Tanggal	Nama Informan	Keterangan
1.	18 Juni 2019	Lilik H.	Caleg No 1 (*incumbent*)
2.	28 Juni 2019	Susilo No Name 2	Warga kec. Gresik Warga kec. Kebomas
3.	29 Juni 2019	No Name 1 Agus S. Ainul F.	Warga kec. Gresik Tokoh Masyarakat Mantan Caleg
4.	5 Juli 2019	Siti M Lilik H.	Caleg No 3 Caleg No 1 (*incumbent*)
5.	13 Juli 2019	Dimyati	Warga Kec. Gresik
6.	14 Juli 2019	Siswanto Abd Rohman No Name 3	Tokoh Agama Tokoh Agama Warga kec. Gresik
7.	19 Juli 2019	Umar T.	Tokoh Agama
8.	21 Juli 2019	Siswanto Siti M	Tokoh Agama Caleg No 3
9.	22 Juli 2019	Abd Rohman	Tokoh Agama

Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yakni melakukan proses wawancara secara bebas, menemukan permasalahan secara terbuka, informan diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada informan. Informan yang akan diwawancara adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama, masyarakat yang paham tentang topik yang dibicarakan dan caleg perempuan PPP yang menjadi peserta pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang ingin diperoleh dari wawancara yakni tentang pandangan masyarakat di Kecamatan Gresik-Kebomas tentang caleg perempuan pada pileg 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan.[19] Dokumentasi digunakan agar penelitian ini terlihat nyata dengan mendokumentasikan setiap agenda kegiatan penelitian, contoh saat mewawancarai para informan. Dokumentasi digunakan untuk menggambil gambar informan yang sedang di wawancara oleh peneliti, hasil rekapitulasi, data monografi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dengan beberapa informan, foto alat kampanye, foto data hasil perolehan suara dari KPUD Gresik dan rekaman wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena analisis datanya dilakukan induktif kualitatif. Penelitian kualitatif berkembang sebagai suatu metode *disciplined inquiry* yang sifatnya lebih induktif. Dalam hal ini peneliti memiliki kadar keterlibatan tinggi (dengan segenap jiwa dan raganya) aktif mendengar,

[19] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000). Hal 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengobservasi, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berfikir, dan menarik infrensi dari apa yang di pelajari di lapangan.[20]

Menurut *Miles* dan *Huberman*,[21] dalam menganalisa data kualitatif dapat melakukan cara yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data sejak memulai pengumpulan data atau wawancara, dari hasil wawancara kemudian dipilah-pilah mana yang menjawab pertanyaan atau yang memiliki keterkaitan dengan pertanyaan dan membuang yang tidak perlu, peneliti menyederhanakan bahasa informan menjadi bahasa tulisan, kemudian mengelompokkan data apakah sesuai dengan asumsi penelitian, kemudian peneliti menggolongkan data disesuaikan dengan konsep, bila peneliti menemukan data yang berbeda dengan hipotesis maka akan dikembangkan menjadi pertanyaan dan dilakukan penggalian data lagi, hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga tidak ditemukan lagi data baru.

[20] Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya.* (Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh, 1990), 77

[21] Miles. Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* (Jakarta: UI Press, 1992), 15-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian Data

Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah di pahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian ini data disajikan berupa teks naratif, data-data yang terkumpul dan telah melalui tahap reduksi kemudian disajikan dalam bentuk paragraf dan dilakukan analisis.

c. Verifikasi

Setelah data disajikan dan dianalisa, peneliti memverifikasi atau menyimpulkan hasil penelitian setelah melakukan analisa yang mendalam dan melakukan peninjauan terkait temuan-temuan dilapangan disesuaikan dengan judul, rumusan masalah dan tujuan, kesimpulan diuraikan berupa teks naratif yang singkat dan padat agar mudah dipahami.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan Triangulasi**.** Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.[22]

Dari keempat macam triangulasi tersebut peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data, dalam penelitian ini trianggulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari satu informan dengan informan yang lain untuk mengecek kebenarannya, peneliti memilih informan dari beberapa sudut pandang dan latar belakang informan seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari caleg dan mantan caleg dan dari masyarakat. Melalui berbagai perspektif atau pandangan akhirnya diperoleh data-data yang mendekati kebenaran. Triangulasi ini peneliti lakukan agar data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian tidak diragukan kebenarannya.[23]

H. Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II Membahas tentang Kajian Teori dan konseptual yang meliputi Konsep Gender, Konsep Gender dan Politik, Konsep Perempuan dalam Politik

Bab III Menyajikan Setting penelitian yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian berupa Sejarah Kota Gresik, Letak Geografis dan Demografi,

[22] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 178
[23] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi Sosial Politik, Perolehan Suara PPP di Pemilu Legislatif tahun 2014 dan 2019.

Bab IV Menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Merupakan Bab terakhir atau Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Konsep Gender

Gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggungjawab, dan pembagian kerja antara laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat, kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, contohnya adalah fungsi reproduksi, menstruasi dan menyusui oleh perempuan, fungsi mempunyai sperma oleh laki-laki.

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris bermakna jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian gender merupakan penggolongan atau pembagian sifat manusia yang ditentukan berdasarkan sifat bawaan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sifat bawaan yang dimaksud misalnya, bahwa laki-laki identik dengan otonom, *independen* (mandiri), ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, *dependen* (bergantung), berkorban, pengasuh anak.[24]

Mansour Fakih mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun

[24] Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta:Kencana, 2013) Hal 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural.[25] Sedangkan Robert Stoller mengartikan gender adalah untuk mebedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan dimana seseorang berada. Gender lebih dimaknai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya di suatu tempat.[26] Maka dapat dikatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri-ciri atau sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.[27]

Terdapat dua pendapat yang saling bertentangan terkait terbentuknya sifat maskulin dan feminin pada laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama meyakini bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada keterkaitan dengan, bahkan tidak bisa lepas dari pengaruh perbedaan biologis atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu pula dengan sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pembentukan sifat maskulin dan feminin tidak disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturasi dalam

[25] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 8

[26] Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, "Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi", *Journal Center for International Forestry Research*, No.29b (Januari, 2009), 3.

[27] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan sosial.[28] Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminin (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat maskulin dan feminin yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (*nurture*). Maka dari dua argumen tersebut munculah teori *nature*, dan teori *nurture.*

1. Teori Nurture

Nurture adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. menurut teori *nurture*, perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang akhirnya menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Hal tersebut berakibat perempuan terpinggirkan peran dan kontribusinya dalam bermasyarakat. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

2. Teori Nature

Menurut teori *nature*. pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, warisan biologis yang dibawa seseorang, sehingga harus diterima. Adanya perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Beberapa peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena berkaitan dengan keadaan biologis.

Kebanyakan orang masih mencampuradukkan pengertian gender dengan takdir. Sebagai contoh, jika perempuan melakukan pekerjaan yang

[28] Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 2001), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi kodrat. Padahal arti dari kodrat itu sendiri merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan, bukan hasil betukan sosial dari lingkungan seperti halnya pekerjaan. gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk kepada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa penjelasan mengenai gender di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi lingkungan, dan dapat berubah sesuai kondisi lingkungan dengan perkembangan zaman.

3. Gender di Wilayah Domestik dan Publik

Dari waktu ke waktu, semakin banyak perempuan yang masuk ke ranah publik untuk bekerja atau memiliki suatu profesi. Keluarnya perempuan dari wilayah domestik ke wilayah publik disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena pendidikan perempuan yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan laki-laki di sektor publik, karena keinginan untuk maju dan berkembang, karena adanya tuntutan zaman yang sudah berubah dan karena bertujuan meningkatkan status sosial.[29]

[29] Hidayati, Nurul, "Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik", *Jurnal Muwazah,* Vol.7 No. 2 (Desember 2015), 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kesadaran dan keinginan kaum perempuan untuk keluar dari wilayah domestik tidak terlepas dari kendala yang bernama kultur. Kultur, sistem dan tata norma yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan untuk berperan ganda, yaitu: berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif). Moser dalam bukunya Mansour Fakih menjelaskan bahwa produktif merupakan peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendapatan tunai atau sejenisnya. Contoh: kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal. Sedangkan reproduktif adalah peranan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas dalam rumah yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga. Contoh: menyusui, melahirkan, mengasuh anak, memasak dan mencuci, dan tugas rumah lainnya.

Keadaan dimana terdapat perbedaan peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan ini menyebabkan munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan yang muncul dari gejala gender ini berfokus pada kaum perempuan. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender meliputi:

a. Marginalisasi

Marginalisasi, dapat dipahami sebagai proses peminggiran atau menggeser perempuan ke pinggir/tepi, dalam arti mengabaikan hak-hak mereka, marginalisasi yang terjadi pada kaum perempuan terjadi secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multidimensional dan disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi, tata norma dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.[30] Marginalisasi kepada perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga dalam rumah, masyarakat atau kultur, dan bahkan pada tingkat negara.

b. Subordinasi

Subordinasi dapat dimaknai penomorduaan atau kedudukan kedua yang berarti sebagai pelengkap bagi kedudukan pertama. Pada dasarnya, subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak lama ada anggapan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan, banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis. [31] Artinya kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang penting dan akibannya dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

---

[30] Sumbulah, Umi. dkk., *Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 14.

[31] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Stereotipe

Stereotipe adalah penilaian atau pelabelan terhadap seseorang kelompok hanya berdasarkan persepsi terhadap seseorang dengan mengkategorikannya. Stereotipe biasanya berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak pada ketidakadilan sosial. stereotipe gender umumnya disandang kaum perempuan dengan label-label yang negatif.

Contohnya, adanya anggapan bahwa perempuan identik dengan menangis, emosional, cerewet, lemah, penakut dan sebagainya, sehingga perempuan tidak dapat dibebani tugas laki-laki.

d. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan dalam kebiasaan masyarakat adalah untuk mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak daripada laki-laki. Dalam keadaannya sekarang, banyak perempuan yang bekerja diluar rumah, namun mereka masih memiliki pekerjaan di dalam rumah jawab yang harus dikerjakan disinilah beban ganda terjadi.[32]

[32] Muniarti, A. Nunuk P, *Getar Gender*, (Magelang : Indonesiatera, 2004) Hal XXIII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gender dan Politik

Masyarakat di Indonesia pada umumnya mengenal perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah lembut, cantik, feminin dan keibuan. Sementara juga memandang kaum laki-laki adalah makhluk yang kuat, rasional, dan maskulin. Padahal, sebenarnya sifat-sifat yang diidentikan kepada perempuan dan laki-laki itu dapat dipertukarkan. Misalkan saja ada laki-laki yang lembut, emosional dan ada pula perempuan yang atletis, rasional dan kuat. Sifat-sifat yang diidentikan tersebut kemudian ditarik kedalam ranah publik, sehingga karena sifat-sifat yang diidentikan tersebut membuat perempuan tidak mampu melaksanakan tugas laki-laki, termasuk bidang politik.

Pandangan terkait gender tersebut juga dapat kita lihat pada kehidupan bermasyarakat di Jawa. Contoh, masyarakat Jawa dahulu beranggapan bahwa bagi perempuan sekolah tidak perlu tinggi-tinggi nantinya juga akan bekerja di dapur. Anggapan-anggapan tersebut menyebabkan sulitnya perempuan untuk terjun di ranah publik, dan diantaranya adalah bidang politik, disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.[33]

---

[33] Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), Hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya meliputi institusi keluarga sampai pada institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.[34] Maka menjadi sangat penting, adanya peran perempuan masuk ke ranah politik untuk dapat ikut andil dalam membuat kebijakan sesuai dan tepat sasaran.

Politik sebagaimana dipahami bersama adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, berkaitan dengan kepentingan banyak orang baik tua, muda laki-laki ataupun perempuan. Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Maka kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, dimana hubungan tersebut harus setara dan seimbang atau dalam hubungan kerja harus bersifat "*partnership*", dalam hubungan bermasyarakat baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik.

C. Perempuan Dalam Politik

Peran perempuan dan politik tentunya tak lepas dari pandangan dan kontruksi sosial perempuan dalam hubungan dengan masyarakat. Pandangan yang selama ini tertanam kuat dalam benak masyarakat adalah konsep

[34] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stereotipe tentang perempuan, utamanya dalam sektor politik dan pemerintahan. *stereotipe* tersebut kemudian menjadi pandangan bahwa perempuan tidak sepatutnya menjadi memimpin, karena mereka tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang berasal dari *stereotipe* tersebut yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender, sehingga peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik.

Ketimpangan yang terjadi berakibat kurangnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia politik serta membatasi wawasan perempuan tentang politik, partai politik pun kurang maksimal dalam memberikan dukungan terhadap kader parpol perempuan, kecuali hanya sebagai pengisi kuota 30 %. Walaupun ada ruang dan harapan bagi perempuan untuk aktif melibatkan diri dalam dunia politik, utamanya menjadi calon legislatif, tetap saja peluang tersebut bergantung pada pimpinan partai politik, karena pimpinan-pimpinan partai politik tersebut lah yang berkuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.[35]

Budaya patriarkhi yang sangat dominan di Asia Tenggara dan Selatan sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun di dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pemimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki

[35] Rosidawati, Imas, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik*, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilegitimasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik.[36]

Keberadaan budaya patriarki yang memandang lemah perempuan juga membuat peran perempuan dibidang politik terpinggirkan. Anggapan lemah itulah yang umumnya menjadikan keterwakilan perempuan di partai politik kurang diminati baik di tingkat kabupaten, daerah, ataupun di tingkat provinsi sekalipun.[37] Begitu pula yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas yang akan menjadi tempat penelitian ini.

[36] Astuti, T. M. P, "Citra Perempuan Dalam Politik",*Studi Gender Dan Anak*. (Purwokerto: YIN YANG, 2008) Vol 3, No 1.

[37] Siti Nimrah dan Sakaria, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik", *Jurnal The Politik*, UNHAS, Vol 1,No 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Umum

Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas adalah 2 wilayah yang saling bersebelahan dalam kabupaten Gresik, keduanya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terpadat dalam kawasan gresik dan menjadi dua Kecamatan yang lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya, karena menjadi pusat perkonomian, industri, pusat pemerintahan, maka dua Kecamatan tersebut telah menjadi kawasan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan keduanya juga sebagai tempat paling bersejarah karena di sanalah sejarah bermulanya kabupaten Gresik.

1. Sejarah Kabupaten Gresik

Wilayah Gresik sudah dikenal sejak abad ke 11, menjadi pusat perdagangan antar pulau dan juga sudah meluas ke berbagai negara, sebagai kota Bandar, banyak pedagang asing yang berkunjung diantaranya dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Benggali, Campa dan lain-lain. Gresik tampil menonjol sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sosok penyebar agama Islam tersebut adalah Syeih Maulana Malik Ibrahim bersama Fatimah Binti Maimun yang masuk ke Gresik pada awal abad ke 11. Syeih Maulana Malik Ibrahim yang sering disebut Sunan Gresik, sekarang makamnya yang berada di Kecamatan Gresik menjadi salah satu rujukan wisata religi di Kabupaten Gresik yang masih ramai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didatangi peziarah.[38] Sedangkan Sunan Giri menurut sejarah adalah anak angkat Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, Sunan Giri yang makamnya berada di Kecamatan Kebomas oleh ibunya diberi nama Jaka Samudra dan kemudian diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri disamping sebagai seorang Sunan atau Wali (penyebar agama) juga dianggap sebagai Sultan atau Prabu (penguasa pemerintahan) yang berpusat di Giri Kedaton dari tempat inilah ia dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Tahun dimana dia dinobatkan sebagai Sultan penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik, dia memerintah kota gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya kurang-lebih 200 tahun.[39]

Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota Wali, karena ditemukan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan keberadaaan para Wali, selain itu Gresik sering juga disebut kota Santri karena keberadaan banyaknya pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang bernuansa keislaman, juga banyaknya industri rumahan yang bernuansa keislaman yang dihasilkan masyarakat misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Pada mulanya kabupaten Gresik masuk wilayah administrasi Surabaya yang bernama kabupaten Surabaya, merupakan subwilayah pengembangan bagian (SWPB), termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri perdagangan, maritim, pendidikan dan wisata.

[38] Id.m.Wikipedia.org/wiki/Sunan Gresik. 12 Juli 2019
[39] Gresikkab.go.id/Profil/Sejarah. 13 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilaksanakannya PP No 38 tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke kota Gresik dan berganti nama menjadi Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

2. Letak Geografis Dan Demografi

Letak geografis Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, ibu kota profinsi Jawa Timur, Kecamatan Kebomas berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, dan Kecamatan Gresik berada di sebelah utara Kecamatan Kebomas. Kecamatan Gresik sebagai pusat pemerintahan memiliki luas wilayah 554,29 Ha yang terbagi menjadi 21 desa dan kelurahan, dengan ketinggian daerah ± 4 meter diatas permukaan laut, memiliki batas wilayah sebelah utara Kecamatan Manyar, sebelah timur Selat Madura sebelah barat dan selatan Kecamatan Kebomas. Jumlah penduduk di Kecamatan Gresik menurut hasil registrasi tahun 2017 adalah sebanyak 82.964 jiwa yang terdiri dari 41.298 Laki-laki dan 41.666 perempuan. Jumlah pekerja berdasarkan profesi adalah 336 orang dibidang pertanian, 8.303 orang dibidang industri, 31 orang dibidang konstruksi, 6.775 orang dibidang perdagangan, 69 orang dibidang angkutan, 2.416 orang dibidang jasa dan bidang lainnya sebanyak 15.050.[40]

[40] Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Industri di Kecamatan Gresik sebanyak 502 industri yang terbagi menjadi 472 Industri Kecil/Kerajinan, 19 Industri sedang dan 11 Industri besar.

Berdasarkan kondisi perdagangan terdapat total 33 pasar dan 22 koperasi yang terbagi menjadi 25 Minimarket, 5 kelompok Pertokoan, 3 Pasar Tradisional, 10 KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) dan 12 koperasi lain.

Kecamatan Kebomas memiliki wilayah seluas 3.006 Ha dengan ketinggian daerah ± 4,5 meter diatas permukaan laut terbagi atas 186,0 Ha tanah sawah, 470,0 Ha pekarangan/halaman, 808,0 Ha tegal/kebun, 591,0 tambak, dan lainnya 951,0 Ha. Batas Kecamatan Kebomas adalah di sebelah utara Kecamatan Manyar, sebelah timur Kecamatan Gresik, sebelah selatan kota Surabaya, dan sebelah selatan Kecamatan Cerme. Jumlah penduduk menurut catatan tahun 2017 sejumlah 107.923 jiwa terdiri atas 54.444 penduduk laki-laki dan 53.479 penduduk perempuan, jumlah penduduk yang bekerja menurut bidangnya yaitu, dibidang pertanian 1.170 orang, industri 28.309 orang, konstruksi 662 orang, perdagangan 4.924 orang, angkutan 986 orang, jasa 2.275 orang dan bidang lainnya 2.435 orang.[41]

Jumlah industri di Kecamatan Kebomas sebanyak 1.488 industri yang terbagi menjadi 1.375 Industri Kecil/Kerajinan, 63 Industri Sedang dan 50 Industri Besar.

[41] Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kondisi perdagangan terdapat total 66 Pasar dan 57 Koperasi yang terbagi menjadi 44 Minimarket, 16 kelompok Pertokoan, 6 Pasar Tradisional, 1 KUD, 29 KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) dan 27 koperasi lain.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam Kecamatan Gresik terdapat sarana pendidikan umum sebanyak 15 SD negeri dan 8 SD swasta, 4 SMP negeri dan 5 SMP swasta, 1 SMA negeri dan 5 SMA swasta, dan 2 Perguruan Tinggi swasta. Dan pendidikan Islam sebanyak 10 MI, 1 MTs, 1 Perguruan Tinggi dan 1 Pondok Pesantren yang semuanya dikelola swasta.[42]

Jumlah Sarana Kesehatan menurut catatan tahun 2017 terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 5 Poli Klinik, 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas pembantu, sebanyak 24 Dokter Praktek, 18 Praktek Bidan, 14 Poskesdes, 106 Posyandu, 21 Apotik dan 13 Toko Obat. Jumlah kejadian gangguan kesehatan menurut jenisnya adalah sebanyak 1.326 Muntaber/Diare, 27 Demam Berdarah, 2.849 Infeksi Saluran Pernafasan dan AID 1 kejadian.[43]

Kondisi keagaman Kecamatan Gresik dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pemeluk Agama dan Kepercayaan, 81.110 orang memeluk agama Islam, 1.080 orang beragama Katolik, 36 orang beragama Protestan, 36 orang beragama Hindu, 245 orang beragama Budha, 36 orang beragama Khonghucu dan 2 orang memeluk Aliran Kepercayaan.

[42] Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
[43] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat tempat peribadatan sebanyak 34 Masjid, 170 Surau/Musholla, 6 Gereja, 1 Pura, 1 Vihara dan 1 Klenteng.[44]

Berdasarkan catatan tahun 2017, jumlah kejadian Nikah dan Cerai di Kecamatan Gresik adalah sebanyak 623 Pernikahan dan 137 Talak dan Perceraian, serta tidak ada kejadian rujuk.

Dalam Kecamatan Kebomas sarana pendidikan terdapat sebanyak 20 SD negeri, 2 SMP negeri, 1 SMA negeri, 41 Taman Kanak-kanak swasta, 6 SD swasta, 6 SMP swasta, 3 SMA swasta dan 3 Perguruan tinggi swasta. Jumlah sekolah Islam adalah sebanyak 2 RA, 10 MI, 4MTs, 3 MA dan 8 Pondok Pesantren yang semuanya dikelola oleh swasta.[45]

Jumlah penduduk menurut pemeluk Agama dan Keyakinan yaitu, sebanyak 105.389 beragama Islam, 631 beragama Katolik, 1.658 beragama Protestan, 97 beragama Hindu dan 148 beragama Budha. Jumlah tempat peribadatan sebanyak 69 Masjid dan 220 Surau/Musholla serta 2 Gereja.[46]

Jumlah kejadian Nikah dan Perceraian menurut catatan tahun 2017 adalah sebanyak 775 Pernikahan dan 102 Talak dan Perceraian, dan tidak tercatat kejadian rujuk.

Jumlah Sarana Kesehatan menurut catatan tahun 2017 adalah sebanyak 2 Rumah Sakit Umum, 14 Poli Klinik, 2 Puskesmas dan 6 Puskesmas pembantu, 42 Dokter Praktek, 2 Rumah Bersalin, 30 Praktek

[44] Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
[45] Ibid
[46] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidan, 14 Poskesdes, 3 Polindes, 134 Posyandu, 16 Apotik dan 22 toko Obat. Jumlah kejadian gangguan kesehatan menurut jenisnya adalah, 1.655 Muntaber/Diare, 31 DB, 5.267 Infeksi Saluran Pernafasan dan Campak 1 kejadian.[47]

4. Kondisi Sosial Politik

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 dapil 1 Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas dan tidak berubah untuk pemilu legislatif tahun 2019. Pada pemilu legislatif tahun 2014 di Dapil 1 Gresik terdapat 12 partai politik yang mengikuti pemilu DPRD kabupaten/kota, sedangkan untuk tahun 2019 jumlah partai peserta pemilu Dapil 1 bertambah menjadi 16 partai politik. Tercatat jumlah DPT sebanyak 75.938 pemilih di Kecamatan Kebomas, dan 61.312 pemilih di Kecamatan, total keseluruhan adalah 138.250 pemilih pada tahun 2019.[48]

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomer 107/kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 Kabupaten Gresik dibagi atas 7 Dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2014 dan tidak berubah pada pemilihan umum tahun 2019, yang meliputi:

[47] Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
[48] Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Daftar Dapil Dengan Jumlah Kursi Di Kab. Gresik 2019.[49]

NO	DAPIL	KECAMATAN	ALOKASI KURSI
1	Gresik 1	Gresik dan Kebomas	7
2	Gresik 2	Menganti dan Kedamean	7
3	Gresik 3	Driyorejo dan wringin anom	7
4	Gresik 4	Duduk Sampeyan, Benjeng, Cerme dan Balong Panggang	10
5	Gresik 5	Sangkapura dan Tambak	4
6	Gresik 6	Dukun, Panceng dan Ujung pangkah	7
7	Gresik 7	Manyar, Bungah dan Sidayu	8

5. Perolehan Suara PPP

Di kabupaten Gresik Partai PPP merupakan partai yang cukup lama dan memiliki simpatisan yang cukup banyak, dapat dilihat pada tabel 4 pada pemilu legislatif tahun 2014 partai PPP pada peringkat ke 3 berdasarkan jumlah kursi yang didapat sebanyak 7 kursi dengan perolehan suara sebanyak 61.170 suara di DPR RI, 43.706 suara di DPRD Provinsi dan 64.128 Suara di DPRD Gresik.

Tabel 3.2 Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Tahun 2014[50]

No	Partai Politik	DPR	DPRD PROV	DPRD GRESIK	
				Suara	Kursi
1	Partai Nasdem	31.133	22.468	30.347	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	134.440	141.993	124.200	8
3	Partai Keadilan Sejahtera	15.117	20.088	22.112	0
4	PDI Perjuangan	58.763	59.382	72.168	6
5	Partai Golongan Karya	144.763	74.175	149.320	11
6	Partai Gerindra	63.425	57.936	76.539	6
7	Partai Demokrat	32.849	51.062	57.173	6
8	Partai Amanat Nasional	30.627	41.083	49.535	5
9	**Partai Persatuan Pembangunan**	**61.170**	**43.706**	**64.128**	**7**
10	Partai Hanura	11.185	11.789	19.828	0
11	Partai Bulan Bintang	3.495	3.076	3.113	0
12.	PKP Indonesia	6.332	8.568	7.898	0
Jumlah		593.299	535.326	676.361	50

[49] KPU Gresik
[50] Kpud-gresikkab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pemilu tahun 2019 perolehan suara PPP menurun hampir di semua wilayah dan termasuk suara keseluruhan DPRD Gresik, dan tetapi di Dapil 1 terdapat kenaikan berikut dapat dilihat dari tabel 5 dan Tabel 6 perolehan suara PPP di DPRD Gresik dapil 1.

Tabel 3.3 Perolehan Suara Parpol Di Dapil 1 Kab. Gresik[51]

No	Partai Politik	Tahun 2014	Tahun 2019
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12.063	20.128
2	Partai Gerindra	7.261	18.022
3	PDI Perjuangan	14.572	6.881
4	Partai Golongan Karya	17.665	11.922
5	Partai Nasdem	1.847	6.244
6	Partai Gerakan Perubahan	-	370
7	Partai Berkarya	-	1.032
8	Partai Keadilan Sejahtera	4.728	4.941
9	Partai Persatuan Indonesia	-	1.097
10	**Partai Persatuan Pembangunan**	**8.823**	**9.256**
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	1.438
12	Partai Amanat Nasional	8.409	13.678
13	Partai Hanura	1.183	125
14	Partai Demokrat	10.493	7.744
15	Partai Bulan Bintang	434	668
16	PKP Indonesia	3.432	-
Jumlah Suara		90.910	103.546

[51] Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk hambatan yang dihadapi caleg perempuan PPP

Masyarakat di Indonesia pada umumnya mengenal perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah lembut, cantik, feminin dan keibuan. Sebenarnya sifat-sifat itu dapat dipertukarkan, namun seringkali hanya disematkan pada perempuan menjadi *stereotipe* yang melegitimasi bahwa pada umumnya perempuan sangat lemah dan terbatas, *stereotipe* tersebut kemudian ditarik dalam ranah publik, sehingga membuat perempuan kesulitan untuk menyentuh tugas yang umumnya dikerjakan laki-laki, salah satunya bidang politik.

Bodang politik sesungguhnya adalah tentang kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya meliputi institusi keluarga sampai pada institusi politik formal tertinggi. Maka pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.[52] Namun pada kenyataannya perempuan jarang dilibatkan karena masih banyak *stereotipe* di benak masyarakat yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender dan perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik.

Demikian juga yang umumnya yang terjadi di Gresik, dalam konteks penelitian ini tepatnya adalah Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Gresik dan

[52] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hal 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kebomas, caleg-caleg perempuan umumnya dan caleg PPP khususnya juga menghadapi tantangan berupa *stereotipe* yang masih sering disematkan pada perempuan, dan juga kondisi bias gender berupa marginalisasi, beban ganda dan subordinasi. pandangan miring tersebut sebagian besar disampaikan dari golongan laki-laki.. Disadari atau tidak hal-hal tersebut masih ada di tengah kehidupan masyarakat Gresik yang sudah semakin maju dan akan menjadi kendala bagi perempuan yang ingin berkarya,

1. Marginalisasi

Salah satu hal yang membatasi keinginan perempuan untuk memasuki ranah publik termasuk politik, diantaranya pandangan masyarakat tentang kepemimpinan dan juga tafsiran agama, bahwa "kepemimpinan itu tetap, urusannya laki-laki, karena Allah melebihkan kaum laki-laki."[53] Sebagian masyarakat juga mengatakan :

> Kalau masih ada laki-laki perempuan dirumah saja, dimanapun maupun dirumah sebaiknya pemimpin itu laki-laki dan dari sisi agama, sebagian masyarakat cenderung memilih pemimpin dari kaum laki-laki.[54]

Terjadinya pengabaian atau peminggiran hak-hak perempuan seperti tergambar dari pernyataan di atas terjadi karena marginalisasi memandang perempuan yang masuk ke ranah publik adalah suatu ketidaknormalan, "bahwa kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang terpaksa"[55] ada pula yang mengatakan :

> Saya kalau memilih pemimpin mantap laki-laki, laki-laki harus jadi pemimpin. Saya condongnya ke laki-laki siapapun orangnya, saya juga

[53] Siswanto, di Masjid jl. Proklamasi, 14 Juli 2019
[54] Dimyati S, di Masjid jl. Proklamasi, 13 Juli 2019
[55] Siswanto, di Masjid jl. Proklamasi, 14 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak tahu menilai baik atau tidak. Pokoknya saya condongnya ke laki-laki jadi pemimpin, dan condong ke agama.[56]

Pandangan demikian adalah bentuk marginalisasi atau peminggiran untuk kaum perempuan, karena memberikan legitimasi yang timpang hanya disebabkan perbedaan gender, dan perempuan yang dirugikan. Marginalisasi juga terjadi dalam keluarga dalam bentuk peraturan tidak tertulis, bahwa segala tindakan sang istri harus disertai izin dari sang suami, sebagaimana disampaikan informan :

> Istri mau nyaleg, gak apa-apa selama suami mengizinkan... Perempuan punya tanggungjawab untuk keluarganya, untuk suaminya dalam melayani suami, kalau suami ndak membolehkan, dia kok membangkang berarti tidak bisa menjadi seorang istri yang baik, padahal syarat seorang istri masuk surga harus taat pada suami ... selama keluarga tidak membolehkan ya dia harus taat pada aturan keluarga ... dia punya hak dan punya kewajiban ... tapi dia banyak dibatasi oleh beberapa hal ... wanita itu harus mengabdi pada suami, kalau belum nikah kan harus taat pada orangtua, tetep ada batasan-batasannya[57]

Keadaan demikian menjadi tantangan yang cukup berat bagi perempuan-perempuan Gresik yang ingin bergerak diranah publik, baik dia masih membujang atau sudah menikah karena budaya patriarki menciptakan marginalisasi yang membatasi perempuan dari harapan-harapan mereka.

Seorang informan yang telah lama aktif di keorganisasian dan pernah menjadi caleg pun dalam rumah tangga mereka memposisikan dirinya sebagai istri yang patuh pada suami, dalam setiap urusannya mereka harus minta ridlo/kerelaan suami. Ia mengatakan :

---

[56] No Name 3, di Kediaman kel. Trate kec. Gresik, 14 Juli 2019
[57] Abd Rohman, di Kediaman Informan, 14 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Misal perempuan jadi presiden, setinggi-tingginya jadi presiden kalau pulang ya nurut dengan suaminya, jadi bagi kita di wilayah publik keduanya setara punya kesempatan yg sama untuk berguna bagi masyarakat, Tapi kalau sudah pulang bagaimanapun harus nurut sama suaminya, Jadi kalau teman2 perempuan bergerak diruang publik berarti harus sudah mendapat izin dari suami. Kalau tidak diizinkan ya dirumah saja.[58]

Hal tersebut dapat membatasi dan mungkin bisa juga menjadi suatu pendukung, karena bila sang suami mengizinkan, tetapi menuntut agar tugas domestik terselesaikan maka tugas publik harus menunggu, otomatis terjadi beban ganda yang menyulitkan perempuan maka harus benar-benar mampu membagi waktu untuk keduanya. Tetapi bila kegiatan istri di ranah publik didukung dan disupport oleh suami, maka ketaatan kepada suami bisa jadi sejalan dengan apa yang diharapkannya.

2. Subordinasi

Selain tantangan, atau bisa dikatakan hambatan di atas perempuan juga memiliki kendala berupa subordinasi, subordinasi bermakna penomor dua-an, subordinasi terhadap perempuan dapat dimaknai sebagai pandangan yang memposisikan perempuan dan perannya lebih rendah dari posisi dan peran laki-laki, bahwa peran dan posisi atau tugas laki-laki takkan sanggup ditanggung perempuan, pandangan ini menyebabkan peran perempuan tidak diakui, dengan pandangan ini muncul kekhawatiran akan terjadi kegagalan bila tugas laki-laki dikerjakan oleh perempuan. Dalam masyarakat Dapil 1 masih banyak yang berpandangan demikian :

> Biarpun memiliki kemampuan, ingat lo ya perempuan itu yang ditonjolkan perasaannya bukan akalnya padahal seorang pemimpin

[58] Ainul F, di Kediaman Informan, 29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> banyak akalnya cara berpikirnya itu lebih ke laki-laki ... laki-laki pinter kan banyak ngapain pilih perempuan kan gitu[59]

Pandangan demikian menampakkan subordinasi pada perempuan dalam hal kepemimpinan, disebabkan *stereotipe* terhadap perempuan tentang perasaan perempuan yang mengalahkan akalnya sehingga menghapus kemampuan yang dimiliki perempuan, pada umumnya mungkin demikian, namun tidak semua perempuan lemah akalnya dan tidak sepatutnya stereotip kemudian membuat kemampuan perempuan dalam hal memimpin atau yang lainnya tidak diakui.

Di Gresik, dalam rumahtangga pun terdapat subordinasi yang mengunggulkan laki-laki dalam hal tanggungjawab mencari nafkah, keadaan tersebut memaksa permpuan harus berperan hanya di ranah domestik, sebagaimana yang sampaikan informan bahwa :

> Perempuan itu biar dirumah, sandang pangan papan tanggung jawab laki-laki, laki-laki yang harus bekerja keras, perempuan tugasnya di dalam rumah, menteri dalam negeri, apalagi kalau sudah punya anak.[60]

Bagi perempuan yang ingin berperan diranah domestik salah satunya caleg perempuan, subordinasi akan membatasi keinginan mereka, maka cara pandang subordinasi akan menjadi salah satu hambatan bagi caleg-caleg perempuan yang ingin bertanding di kancah politik. Bahkan dalam parpol pun sangat umum menjadikan perempuan itu nomor dua, atau cenderung memanfaatkan caleg perempuan sebagai pengisi kuota 30% dan pendongkrak suara contohnya :

---

[59] Dimyati S, di Masjid jl. Proklamasi, 13 Juli 2019
[60] Umar T, di Kediaman kel. Bedilan kec. Gresik, 19 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Semua dapil memang harus ada caleg perempuannya dan ada yang jadi priotitas, kemudian mereka diajak dan ditanya serius atau tidak ikut bursa caleg, kalau tidak serius, tidak perlu keluar biaya, menyerahkan persyaratan saja yang tujuannya untuk mendokrak suara saja.[61]

Dari pernyataan diatas mungkin subordinasi tidak terlalu berdampak buruk bagi perempuan karena dari awal sudah ada kesepakatan "kalau tidak serius", namun dampak buruknya partai-partai akan menampilkan calon-calon yang tidak bermutu dan tidak serius, sehingga bila sampai terpilih kemudian menjadi anggota dewan, dia hanya caleg perempuan yang "tidak serius" itu hanya menjadi penghias ruangan.

3. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali negatif, bersifat persangkaan berdasarkan kondisi umum jenis kelamin tersebut, pelabelan negatif tersebut seringkali memberikan gambaran yang kurang tepat karena belum tentu individu yang diberi label sesuai dengan label yang disematkan, yang terjadi dalam masyarakat Gresik khususnya di Dapil 1, masih banyak pandangan yang bermuatan *stereotipe*, dan dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat bagaimana *stereotipe* kepada perempuan menjadi salah satu hambatan bagi caleg perempuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

Stereotipe kepada perempuan seringkali dipukul-ratakan dan ditarik ke ranah publik, anggapan-anggapan miring disematkan kepada perempuan kemudian berakibat meragukan peran perempuan di ranah publik dan dalam hal ini memandang lemah kepemimpinan perempuan,

[61] Ainul F, di Kediaman Informan, 29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stereotipe tersebut umumnya mengatakan bahwa "perempuan itu kan suka mengedepankan perasaan ... kalau sudah jadi hakim ... perasaan yang muncul bukan benar salahnya."[62] Pernyataan tersebut kemudian mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perempuan dan memandang bahwa perempuan tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan adil karena dipengaruhi perasaan. Akhirnya banyak orang menolak kepemimpinan perempuan dengan mengatakan :

> Saya kalau pemimpin apalagi presiden perempuan itu cenderung tidak setuju, karena perempuan itu lebih ke perasaannya kalau laki-laki itu lebih ke logikanya, sudah kodratnya begitu.[63]

Seperti pernyataan di atas, seringkali kelemahan perempuan dikaitkan dengan kodratnya. Adapula *stereotipe* muncul dari perempuan sendiri, ketika mereka ditanya tentang caleg laki-laki atau perempuan mereka mengunggulkan laki-laki dan mengatakan "kalau ada caleg laki-laki atau perempuan, lebih baik laki-laki tidak rumit, perempuan rumit, kalau laki-laki kan tegas."[64]

Bentuk *stereotipe* yang lain menggambarkan perempuan itu serba terbatas dan terikat dengan keterbatasannya "karena wanita itu lemah, pada dasarnya juga lemah dikaitkan secara umum wanita itu kondisinya lemah, karena terhalang dengan berbagai hal"[65] sehingga geraknya di ranah publik akan terganggu dan akan membahayakan dirinya sendiri sebab pandangan masyarakat umumnya, "wanita itu harus tetap dilindungi,

[62] Siswanto, di Masjid jl. Proklamasi, 14 Juli 2019
[63] Dimyati S, di Masjid jl. Proklamasi, 13 Juli 2019
[64] No Name 2, di Kediaman kel. Klangonan kec. Kebomas, 28 Juni 2019
[65] Abd Rohman, di Kediaman Informan, 14 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan kondisi fisiknya wanita itu berbeda dengan laki-laki,"[66] padahal dalam hal perlindungan dari kejahatan misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan perlindungan.

Kemudian, bila caleg perempuan sudah dapat berperan di ranah publik dan sudah memenuhi kriteria sebagai anggota dewan serta mendapat izin dari keluarga atau suami, apakah akan mengganggu di lingkup domestik ?

> Yang jelas mengganggu, sebagai fungsi seorang ibu, sebagai fungsi seorang ibu rumah tangga, dia kan punya tanggungjawab untuk keluarganya, untuk suaminya dalam melayani suami,[67] mestinya harus merawat anak, dia pagi harus berangkat, anaknya belum berangkat sekolah, belum ini belum itu, banyak terbengkalai toh, anda sendiri pun harus dibuatkan kopi harus dibuatkan sarapan pagi, tidak ada.[68]

Keterangan diatas dan pelabelan semacam itu masih berbuntut panjang hingga menimbulkan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang mengikat dan paten bahwa "tugasnya ibu itu rumahtangga, mendidik anak memberi pelajaran akhlak, laki-laki ya nyari duit memang kewajibannya dia,"[69] yang akhirnya dilihat sebagai hal yang sudah biasa oleh perempuan sendiri. Sebagaimana salah satu caleg perempuan melihat pembagian tugas yang demikian adalah kodrat yang harus diterima, ia mengatakan :

> Sebagai perempuan, dikodratkan sebagai ibu rumahtangga, meskipun menjadi wanita karir pun, tidak bisa lepas dari tanggungjawab di rumah, sebagai kedudukannya pengurus rumah tangga.[70]

---

[66] Ibid
[67] Abd Rohman, di Kediaman Informan, 14 Juli 2019
[68] Ibid
[69] Umar T, di Kediaman kel. Bedilan kec. Gresik, 19 Juli 2019
[70] Siti M, di Via Chat Whatsapp, 21 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sudah menjadi sebuah norma atau kebiasaan umum untuk "membiarkan laki-laki yang membiayai/kerja yang penting istrinya di rumah mengurus anak".[71] Kondisi masyarakat yang tergambar dari temuan-temuan yang peneliti dapat di atas, kesemuanya adalah bentuk *stereotipe* yang berakibat pembagian tugas domestik-publik yang bias gender dan umum terjadi pada masyarakat Gresik di Dapil 1. Melihat bahwa *stereotipe* lah yang berdampak pada peran perempuan yang terbatas dalam masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian tugas tersebut bukanlah kodrat, bukan disebabkan kondisi *nature* perempuan, melainkan lebih dikarenakan *nurture* atau disebabkan konstruksi sosial, konstruksi atau proses bentukan dari masyarakat berupa tindakan, interaksi dan norma atau kebiasaan yang menciptakan pembagian peran laki-laki dan perempuan.

Kondisi sosial yang tergambar diatas, dapat menjadi hambatan bagi perempuan khususnya caleg perempuan untuk berperan di dunia politik, tetapi hambatan tersebut masih bisa dilalui tergantung bagaimana caleg perempuan merespon *stereotipe* tersebut kemudian membuktikan pada lingkungannya bahwa keadaan tersebut bukanlah sebuah kodrat dan dapat berubah, bagaimana ia menunjukkan kualitasnya di ranah publik hingga mampu mematahkan berbagai pandangan miring terhadapnya dan perempuan umumnya, dan memanfaatkan *stereotipe* pada perempuan yang justru positif menjadi sebuah label positif untuk mendapatkan dukungan

[71] Dimyati S, di Masjid jl. Proklamasi, 13 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, karena *stereotipe* tidak selalu merugikan perempuan, contohnya seperti yang dikatakan simpatisan caleg perempuan no 1 :

> Berapa persen perempuan dan laki-laki yang melakukan kesalahan, seperti korupsi, perempuan kan jarang dibanding laki-laki, lebih jujur lah kebanyakan kan seperti itu.[72]

Stereotipe sering kali negatif, namun terkadang ada juga yang positif. Dan ternyata pelabelan negatif terhadap perempuan dapat memberikan dampak negatif yang berantai pada perempuan seperti adanya marginalisasi dan subordinasi perempuan. Jadi untuk memperbaiki kondisi yang bias gender tersebut, melawan atau mematahkan pelabelan negatif bisa jadi satu langkah awal oleh perempuan.

4. Beban Ganda

Beban ganda dapat dimaknai salah satu jenis kelamin memiliki pekerjaan atau tanggungjawab lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Beban ganda terhadap perempuan biasanya mereka yang telah berprofesi di luar rumah, masih harus mengerjakan pekerjaan di rumah.

Bagi perempuan dan dalam hal ini caleg perempuan, hal tersebut menjadi kendala bagi mereka karena harus membagi waktu dan tenaga dalam banyak urusan, karena caleg perempuan tersebut mengemban suatu tugas di luar namun mereka tetap harus menyelesaikan pekerjaan mereka dalam rumah. Keadaan demikian disebut *double burden* atau beban ganda, perempuan yang taat pada suami bisa saja diizinkan memiliki urusan diluar rumah dengan syarat harus menyelesaikan tugas dirumah, meskipun ada pembantu rumah tangga, seringkali para suami tetap menghendaki

[72] Susilo, di Kedai Milik Informan kel. Lumpur kec. Gresik , 28 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar istri tetap mengambil tanggungjawab dirumah. Seorang informan mengatakan :

> Gak apa-apa selama suami mengizinkan. Itu pun dia sebagai seorang perempuan, itu pun harus bisa membagi waktu kapan untuk keluarga, kapan untuk suami, kapan ia harus melaksanakan tugasnya sebagai dewan misalnya.[73]

Pernyataan di atas yang menjelaskan adanya beban ganda bagi perempuan yang masuk ke ranah publik termasuk para politisi perempuan, gambaran realita tersebut dikuatkan dengan keterangan seorang kepala sekolah perempuan yang juga mantan caleg, dan beliau menyampaikan demikian :

> Memang perbedaan ulama selalu ada, tentang gerak perempuan diranah publik mereka oke2 saja yg penting tidak melawan kodrat, kalaupun ada beban ganda yg harus ditanggung maka harus beres yg domestik dulu kemudian bisa ngurusi yg publik, dan lebih banyak yg begitu. Tp sebenarnya kalau dirumah ya diurusi bersama mengurus rumah dan anak bukan yg laki2 saja yg cari uang.[74]

Salah satu caleg perempuan juga menympaikan seperti keterangan diatas ketika ditanya tentang pembagian tanggungjawab didalam keluarga, mereka beranggapan bahwa beban tanggungjawab perempuan didalam rumah merupakan ikatan kodrat atau *nature*, ia berpendapat :

> Sebagai perempuan, dikodratkan sebagai ibu rumahtangga, meskipun menjadi wanita karir pun, tidak bisa lepas dari tanggungjawab di rumah, sebagai kedudukannya pengurus rumah tangga ... Pembagian tugas iya, tetapi lebih banyak saya yang menghandel,[75]

Anggapan bahwa tanggungjawab di ranah domestik adalah tugas perempuan, sesungguhnya adalah disebabkan *nurture*, hasil konstruksi dari suatu proses sosial, dalam pembahasan *strereotipe* pelabelan negatif yang

[73] Abd Rohman, di Kediaman Informan, 14 Juli 2019
[74] Ainul F, di Kediaman Informan, 29 Juni 2019
[75] Siti M, di Via Chat Whatsapp, 21 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus menerus terjadi kemudian membentuk suatu keadaan dimana pembagian tanggungjawab domestik adalah tugas perempuan, dan akhirnya terjadilah beban ganda karena ada anggapan bahwa meskipun perempuan sudah berprofesi diluar rumah, tanggungjawab didalam rumah tetaplah kewajiban perempuan yang harus dilaksanakan.

5. Faktor Personal Caleg

Selain hambatan yang berhubungan dengan status mereka sebagai perempuan, mereka sebagai caleg juga memiliki hambatan lainnya, seperti sulitnya membagi waktu dalam pekerjaan mereka dan juga sebagai caleg. sebagaimana yang di alami Ibu Siti M. Karena menjadi caleg adalah pengalaman baru bagi beliau, karena kesibukannya sebagai tenaga pengajar maka sangat sedikit proses sosialisasi atau mengambil hati masyarakat yang dilakukannya, dan niatannya menjadi caleg karena sekedar coba-coba karena ada ajakan dari internal partai. Akibatnya dukungan dari masyarakat pun tidak banyak diperoleh, ia mengatakan :

> Kendalanya adalah saya sendiri kurang maksimal dalam sosialisasi karena kendala waktu. Tp karena saya kemarin itu kurang maksimal ya. ... Pada saat ada pertemuan2 rutin misal undangan pengajian, arisan, bahkan saya tidak berusaha secara langsung untuk promosikan diri meskipun teman2 mendorong saya. Saya berpikir kalau orang2 mau memilih saya ya Alhamdulillah, kalau tidak mau ya kenapa saya harus memaksakan.[76]

Kemudian hambatan terbesar yang mempengaruhi sebagian caleg perempuan disebabkan bagaimana mereka memahami kodrat mereka sebagai perempuan, mereka meyakini bahwa keterbatasan dan keterikatan

[76] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan tugas-tugas domestik adalah sesuatu yang bersifat kodrat, demikian yang caleg no 3 pahami :

> Sebagai perempuan, dikodratkan sebagai ibu rumahtangga, meskipun menjadi wanita karir pun, tidak bisa lepas dari tanggungjawab di rumah, sebagai kedudukannya pengurus rumah tangga ... Pembagian tugas iya, tetapi lebih banyak saya yang menghandel,[77]

Dari pernyataan di atas dapat diketahui ternyata dari sebagian perempuan bahkan caleg perempuan di Dapil 1 masih berpandangan bahwa kodrat mereka adalah sebatas berperan di ranah domestik. Hal ini adalah kendala terbesar dari seorang caleg perempuan ditambah kurangnya keseriusan dalam memenangkan dukungan masyarakat. Maka keterpilihan caleg perempuan di dapil 1 akan sangat sulit terjadi bila hal tersebut masih ada.

6. Faktor Relasi Sosial Dapil 1

Selain kendala terkait ketidakadilan gender dan juga faktor dari caleg, Kendala lain yang juga dihadapi caleg perempuan yaitu terkait relasi atau bentuk hubungan antara caleg dan masyarakat. Terkadang sebagai caleg mereka menghadapi kendala harus berhadapan dengan kelompok masyarakat yang transaksional, dengan terang-terangan menukar hak suara mereka, sebagaimana pengalaman caleg no 3, ia mengatakan :

> Soalnya kalau sosialisasi, kita kan tidak munafik ya, kalau mau dipilih pasti ngasih apa dan bukan rahasia umum, Misalnya seperti di grub Wa, ayo mbak kok tidak sosialisasi, mungkin mau memberi darbuka (alat musik), atau seragamnya ibu2, sudah diminta begitu. Terus, mohon maaf mbak muna ada Bu Amanah dari Demokrat ngasih 1 JT, mbak mau memberi berapa silahkan nanti suaranya dibagi.[78]

[77] Siti M, di Via Chat Whatsapp, 21 Juli 2019
[78] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap masyarakat yang cenderung suka "bertransaksi" tersebut menandakan bahwa beberapa kelompok masyarakat tidak membedakan caleg laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih memilih disebabkan pemberian-pemberian. Keadaan juga menggambarkan bahwa masyarakat tidak mempercayai janji-janji kampanye dari caleg sebab masyarakat sudah sering ditipu oleh janji-janji palsu pelaku politik, informan menambahkan :

> Jadi, menurut saya bukan masalah laki-laki perempuan. Tp berapa besaran yg akan diberikan ... Seumpama dari sini diterima dari sana diterima, trus yg dipilih siapa. ya monggo kalau mereka janji mau memberikan suaranya, tetapi tidak mungkin karena semuanya diterima ... Pengalamannya PK nur Kholid. Dulu DPRD Gresik . nyaleg di DPRD provinsi pun tidak jadi. Itu katanya, padahal saya sudah memberikan shodaqoh politik 150 JT.[79]

Kemudian peneliti bertanya, Apakah tidak ada harapan atas janji2 politik setelah caleg terpilih? informan menjawab :

> Menurut saya tidak. Karena mereka berpikir, kalau sudah jadi pun belum tentu ingat, yg penting sudah dapat uang. Apapun janjinya gk diingat (gk penting) ... Ada *breefing* dari partai, kalau memang bapak/ibu tidak ada sesuatu yg diberikan, janji yg bisa dibuat pegangan, panjenengan ke kelurahan ke kepala desa apa yg diperlukan ttd diatas materai.[80]

Menurut hasil wawancara di atas pola pikir masyarakat yang cenderung praktis mendorong caleg-caleg untuk melakukan kecurangan dalam sosialisasi dan kampanye, dan polemik ini bisa menjadi hambatan bagi caleg-caleg yang ingin berlaku jujur, di sisi lain memberikan keuntungan dalam kesempitan bagi pelaku politik kotor.

---

[79] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019
[80] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan masyarakat yang cenderung memilih money politik tergambar dengan hasil wawancara dengan informan yang tinggal di Kelurahan Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Berikut pembicaraan dengan informan :

> Tidak ada yang memberi uang ya mana mungkin (nyoblos) memilih, kalau diberi uang ya berangkat (mencoblos). Terus apakah anda kemarin golput? (peneliti) tidak ada yang ngasih uang, ada yang ngasih uang ya brangkat, dia enak, kita tidak enak, dia kalau jadi enak-enak senang-senang. Kita tidak dapat apa-apa ... Apa kemarin gak ada yang ngasih uang? (peneliti) Tidak ada yang ngasih uang kok, kalau dia memberi 50 ribu berangkat ... kemarin itu tidak ada yang ngasih uang, ditangkap katanya, jadinya tidak ada yang ngasih uang. tidak ada yang berani karena di Gresik ini banyak yang ditangkap.[81]

Selain hambatan terkait *money politic*, terdapat hambatan lain seperti banyak warga yang tidak mengenal caleg perempuan PPP karena beberapa lokasi kurang mendapatkan perhatian caleg dan juga partai pengusung, bahkan di sekitar kantor DPC PPP sendiri banyak warga yang tidak mengenal sosok caleg, hanya mengetahui nama dan gambarnya. Sebagaimana penuturan warga di sana yang tidak mau disebutkan namanya :

> Seperti ini ya, kantornya di sini kalau bisa akrab dengan warga, kita. Ini hanya rapat terus hilang, jadi tidak ada (yang kenal) yang mana namanya bu Lilik itu tidak tahu, kalau kampung Randuagung kemungkinan akeh seng kenal, ini Kntornya disini tapi kalau bukan tim suksennya, kalau bukan tim suksesnya tidak bisa kenal.[82]

Keterangan warga tetangga kantor DPC PPP diatas menandakan, bahwa proses sosialisasi dari caleg sendiri dan dari parpol atau tim sukses kurang optimal, hal tersebut menjadi kendala meraih dukungan

[81] No Name 2, di Kediaman kel. Klangonan kec. Kebomas, 28 Juni 2019
[82] No Name 1, di Kediaman kel. Pekauman kec. Gresik, 29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Bahkan seharusnya warga sekitar kantor PPP mendapat perhatian lebih, agar lebih banyak dukungan dari masyarakat.

B. Dukungan yang diperoleh caleg perempuan PPP

Di wilayah Gresik, keterwakilan perempuan sudah meningkat namun masih kurang dilihat dari jumlahnya yang telah menjadi anggota dewan, adanya pandangan miring tentang kepemimpinan perempuan dalam benak masyarakat membatasi gerak caleg perempuan, meskipun demikian adapula beberapa caleg perempuan Gresik berhasil maju menjadi anggota dewan, disebabkan dukungan yang mereka peroleh.

Di Dapil 1 keterpilihan perempuan sangat sulit, kalaupun ada yang terpilih kemungkinan besar adalah *incumbent* seperti halnya Caleg No 1. Karena dia telah memiliki relasi yang kuat dengan masyarakat dan memiliki tim sukses yang membantunya. Dan yang terpenting adalah dukungan dari keluarga caleg sendiri, dan pada umumnya dukungan dari keluarga didapatkan oleh caleg-caleg perempuan. Pandangan untuk tetap mendukung kepemimpinan perempuan sebagian besar didapat dari informan perempuan.

Beberapa hal yang menjadi menjadi faktor pendukung bagi caleg perempuan diantaranya adalah :

1. Dukungan Keluarga

Laki-laki yang sering dikatakan menjadi faktor penghambat kemandirian perempuan, dalam hubungan keluarga terkadang justru menjadi penyemangat dan dapat menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjun di dunia politik, sebagaimana yang dialami Caleg no 3 ketika menjadi calon anggota legislatif di Dapil 1 Kabupaten Gresik, meskipun akhirnya ia tidak lolos, ia mengatakan :

> Ya istilahnya semuanya mendukung, dari teman, saudara dengan ikut mengkampanyekan ke teman kerja mereka ... Suami waktu itu mengira pencalegkan saya itu bercanda karena saya asalnya bukan orang partai, tp setelah semua proses pendaftaran selesai, suami agak kaget, tapi akhirnya mendukung juga ikut membantu sosialisasi.[83]

Demikian juga yang dialami Caleg no 1, sebagai caleg dan juga *incumbent* merasa bahwa apa yang telah dicapainya tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekatnya :

> Berkat dukungan dari kluarga dan teman-teman, baik dukungan moral maupun materi, pada tahun 2019 saya baru pertama kali mencalonkan diri untuk menjadi Anggota legilatif melalui partai Kebangkitan Nasional Ulama, Alhamdulillah saya berhasil memperoleh suara terbanyak.[84]

Dukungan moral dan materi yang diterima Caleg no 1 dari keluarga dan suaminya sesuai dengan apa yang disampaika oleh informan lainnya yang masih bertetangga dengan Caleg nomor 1, demikian beliau menyampaikan:

> Bu Lilik ya, suaminya pengusaha, dia nyaleg sudah tiga kali jadi kalau gk salah, sudah 3 periode ya, jadi kalau memang suaminya mengijinkan bahkan di danai dia itu, disupport, gak apa-apa selama suami mengizinkan.[85]

Dari beberapa hasil wawancara di atas membuktikan bahwa bagi caleg-caleg perempuan mendapat restu dan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Dan dukungan tersebut sangat berdampak bagi gerak perempuan diranah publik.

---

[83] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019
[84] Lilik H, Via Chat Whatsapp, 5 Juli 2019
[85] Abd Rohman, di Kediaman Informan, 14 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dukungan Partai

Selain mendapat dukungan dari keluarga, caleg perempuan PPP juga mendapat dukungan dari internal PPP yang mencalonkan mereka. Pengalaman Siti M. menjadi Caleg berawal dari ajakan Internal PPP yang merupakan teman sesama Alumni Pondok Mambaus Sholihin, ia mengatakan :

> Pak Huda ini kan orang PPP teman di Mambaus Sholihin alumni Mambaus Sholihin, terus ini ngobrol pas waktu itu ada keluhan guru honorer, ngobrol lama (WA) pas bulan rhomadlon, terus ditawari, gk pengen tah ikut nyaleg, kan caleg kan identik dengan money politik, terus saya bilang aku loh gk duwe bondo, bondo opo, gk atek bondo pokok,e syarat,e wedok, syaratnya perempuan, akhirnya yawes gapapa, deal ya, nanti ada pertemuan samean ngisi formulir, terus ada pertemuan itu, ngisi formulir melengkapi pakta integritas, itu .... ya baru ini jadi anggota parpol begitu ikut caleg otomatis jadi anggota.[86]

Bentuk dukungan lainnya yang juga didapatkan oleh caleg perempuan PPP diantaranya bantuan stiker dari partai dan adanya teman dan saudara yang menjadi relawan kampanye. Ia mengatakan :

> Dari PPP dapat bantuan stiker buat kampanye atau sosialisasi .. Untuk mempromosikan diri ya sekedar stiker banner dan saudara, teman2 (mulut ke mulut).[87]

Dalam partai PKB pun demikian, caleg perempuan juga dimudahkan untuk menjadi caleg, diajak dan diberi dorongan untuk memenuhi kuota 30%, seperti pengalaman Ainul F. ketika dulu ikut bursa caleg, perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik sangat didukung, ia menyampaikan :

> Klw di PKB sendiri ada Prioritas. Terkait perempuan prioritas itu maksudnya begini semua dapil itu memang harus ada caleg perempuan nya dan yg priotitas ini ditakoni maksudnya, nyaleg temen apa tidak, kalau ndak serius gak usah bondo, nyetor persyaratan aja. Intinya untuk mendokrak suara saja. Klw memang dia itu caleg potensial dalam artian ditarget untuk bisa

[86] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019
[87] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mewakiki di dapil tersebut, ya dia harus bekerja keras harus punya tim dan kerjasama.[88]

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dukungan partai PKB dan PPP dalam hal rekruitmen caleg perempuan sangat terbuka, bagi caleg perempuan yang serius dituntut untuk berusaha keras dan mengeluarkan moda, namun, sayangnya disisi lain sebagian caleg perempuan digunakan untuk mendongkrak suara saja, hal tersebut disadari atau tidak telah menjadikan caleg perempuan sebagai pelengkap atau subordinat, untuk melengkapi formasi caleg disebabkan peraturan tentang kuota 30% perempuan dan untuk mendongkrak suara.

3. Dukungan Masyarakat Dan dan Faktor Personal Caleg

Bagi caleg perempuan yang sudah berpengalaman seperti halnya Caleg No 1 Lilik H, dikarenakan sudah pernah menjabat tetap ada pendukung yang setia, hal tersebut karena terdapat hubungan dan silaturahim atau yang diistilahkan oleh Ainul F dengan kata "Ngramut", yang berkelanjutan antara caleg perempuan dengan simpatisan, salah satu simpatisan Caleg Nomor 1 dan *Incumbent*, menyampaikan :

> Saya bu Lilik saja, meskipun sudah jadi gitu ya, beliau tetap .. terus janji-janjinnya tidak terlalu meleset (tepat janji), yang sudah-sudah, orang setelah masuk gitu kan memberi harapan-harapan saja, setelah jadi ya sudah tidak ada apa-apanya (gk ngasih apa-apa) kebanyakan begitu ... Terkadang orang yang gk terlalu kenal kemudian masuk kampung gitu ... yang kira-kira trackrecordnya bagus, sama orang baik, masuk kampung (sosialisasi) masih diterima ... seperti Nur Hamim dulu sebelum jadi kan merakyat ... sampe sekarang tetap, dia kan termasuk ketua pedagang-pedagang, terus cerita dari teman-teman yang punya lapak kaki lima di GKB sana yang diobrak-obrak itu ya dicarikan solusi, tetap memperjuangkan, di tempat saya suaranya stabil.[89]

---

[88] Ainul F, di Kediaman Informan, 29 Juni 2019
[89] Susilo, di Kedai Milik Informan kel. Lumpur kec. Gresik , 28 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa siapapun anggota legislatif yang mau menepati janjinya dan tetap berhubungan baik dengan masyarakat akan tetap didukung, baik laki-laki maupun perempuan tampa membedakan jenis kelamin. Demikian juga Caleg No 1, ia dipercaya masyarakat karena informan memandang caleg tersebut tepat janji dan tetap berhubungan dengan masyarakat. Sementara Caleg perempuan selain Lilik H, caleg nomor 2 dan 3, sebagian besar masyarakat tidak mengenal mereka.

Personal Caleg No 1 yang *incumbent* memiliki posisi strategis dalam masyarakat membuatnya berpotensi meraih dukungan yang cukub banyak dibandingkan caleg perempuan lain sebagaimana dikatakan informan yang mantan caleg PKNU/PKB :

> Bu Lilik dulu sampai sekarang ketua muslimat. Menurut saya Bu Lilik itu memang disiapkan untuk jadi potensial karena sudah incumben, selain Bu Lilik itu tidak terlalu berefek terkait penomoran. Kita cukup dekat dengan PPP dan biasa ngumpul dan GK pernah konflik ... Bu Lilik ini posisinya kuat karena orangnya merawat konstituennya.[90]

Posisi Caleg No 1 selain sebagai *incumbent* juga sebagai ketua muslimat serta kedekatannya dengan PKB juga memperbanyak relasi, karena simpatisan PKB dan PPP umumnya sama yakni dari warga NU. Selain itu pribadi yang ramah juga ramah menjadi ciri Caleg No 1, hal tersebut dipandang memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Informan menambahkan :

> Bu Lilik orangnya baik supel, tp terkait kebijakan2 ini masih kurang, ya mohon maaf, secara intelektual masih kurang mumpuni, tp dia Istiqomah dan ngramut konstituen, namun secara kedinasan tidak terlalu menjadi decision maker, tp selebihnya kepada masyarakat dia baik. [91]

[90] Ainul F, di Kediaman Informan, 29 Juni 2019
[91] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan menggambarkan personal Caleg Perempuan No 1 sebagai seorang yang baik dan ramah, meskipun dari sisi kinerjanya masih kurang tetapi orangnya tetap bersungguh-sungguh dan juga "ngramut" atau merawat simpatisan dan pemilih-pemilihnya. Informan lain menambahkan :

> Bu Lilik orangnya supel, meskipun inkumben tetapi tidak sombong, sama kita biasa saja, ya sebagai teman di partai, baru di partai ini jadi agak dekat, kalau mau ada kegiatan, beliau infokan.[92]

Melalui penjelasan beberapa informan, Caleg No 1 kepribadian yang tepat janji atau amanah, ramah, tidak sombong dan dekat dengan sebagian masyarakat yang menjadi simpatisannya, membuatnya berpotensi meraih dukungan dari masyarakat, dan sifat-sifat yang baik tersebut bukan sifat bawaan *Nature* yang sering dilekatkan pada perempuan, yang akhirnya masyarakat akan melihat keunggulan dan kemampuan caleg bukan berdasarkan gender.

Beberapa informan juga mendukung dan tidak mempermasalahkan dengan adanya caleg perempuan. Seperti pandangan Agus S. Meskipun dia tidak memilih caleg perempuan tp dia sangat mengapresiasi adanya caleg perempuan beliau mengatakan :

> Kan gini mas, indonesia kan penduduknya kan banyak wanita daripada laki-laki, lo kenapa kok tidak, kan perempuan kan barangkali tau juga perasaannya antar perempuan, la kalo laki kan barangkali kemauannya keras, suara perempuan tidak didengarkan, la kalau perempuan kan mungkin perasaannya tinggi podo-podo perasaannya yo tidak popo aja kalo saya, pemimpin perempuan gpp yang penting faham betul dengan keadaan yo kan tidak masalah, lawong kalau kita memaksakan kehendak

[92] Siti M, di SLB tempat Informan mengajar, 5 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yo tidak bisa, ya kalau pribadi saya ya gapapa, lawong ditempat saya kepala sekolahnya perempuan kok.
> Tapi dengan adanya caleg laki-laki dan perempuan, lebih manteb yang mana (untuk dipilih)? (informan bertanya).
> Ya kalau saya pribadi laki ya pasti laki mas, tapi kasihan kan kalau perempuan didiskriminasi kan gak boleh, monggo saja … kalau dia mampu kenapa tidak. [93]

Demikian beberapa dari kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat memberikan pandangan mereka terkait kepemimpinan perempuan, terutama dalam hal ini adalah caleg perempuan PPP, umumnya yang tetap mendukung kepemimpinan perempuan adalah dari kalangan perempuan itu sendiri, Beberapa dari mereka berpandangan perempuan harus diberi kesempatan dan sebagian yang lain tidak mempermasalahkan jenis kelamin, yang penting siapa yang maju di arena politik harus memiliki kemampuan dibidang tersebut, dan dapat mengambil hati masyarakat untuk mendapatkan dukungan.

[93] Agus S, di Kediaman ds. Tlogobendung, 29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa, didapatkan kesimpulan bahwa caleg perempuan dapil 1 Kabupaten Gresik parpol PPP dalam langkahnya mengikuti kontestasi politik mendapat dukungan yang mereka peroleh dari sebagian masyarakat, keluarga, saudara dan teman serta partai PPP sendiri berbentuk dukungan motivasi, dana kampanye, bantuan sosialisasi dari mulut kemulut, alat atau fasilitas sosialisasi/kampanye.

Caleg perempuan juga mendapatkan beberapa kendala dalam prosesnya menjadi caleg. Bentuk kendala yang dihadapi umumnya berupa pandangan miring dari masyarakat dan relasi cenderung bias gender. Kendala tersebut berbentuk: marginalisasi, subordinasi, s*tereotipe* dan beban ganda. Kendala lainnya yaitu kurang optimal dalam sosialisasi dan pemahaman sebagian caleg tentang kodrat mereka sebagai perempuan yang masih bias gender, serta pandangan sebagian masyarakat yang cenderung suka dengan *Money politic*.

B. SARAN

Saran peneliti adalah agar ada penelitian lanjutan terkait hubungan caleg perempuan dan *money politic*, dan penelitian terkait caleg perempuan dan kota santri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggambarkan suatu interaksi sosial melalui cara pandang analisis gender. Dikarenakan hanya memakai satu cara pandang, penelitian ini tidak dapat menggambarkan secara utuh, sehingga peneliti berharap akan banyak dilakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat mengcover kekurangan penelitian ini, karena peneliti merasa banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hesti A. dan Dian N. 2005. *Menggugat Hak Politik Perempuan* Jakarta: KSP.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Faisal, Sanapiah. 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya.* Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh.

Miles. Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.

Jurdi, Syarifuddin, 2013, *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik* Jakarta: Kencana.

Megawangi, Ratna, 2001, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.

Sumbulah, Umi. dkk. 2008, *Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press.

Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muniarti, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesiatera.

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL :

Astuti, T. M. P. 2008. "Citra Perempuan Dalam Politik",*Studi Gender Dan Anak*. Purwokerto: YIN YANG, Vol 3, No 1.

Hidayati, Nurul, 2015, "Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik", *Jurnal Muwazah,* Vol.7 No. 2

Wahid, U. 2013. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012". *Malaysian Journal of Communication. Vol. 29 issue 1,*

Suciptaningsih, O. A. 2010. "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal". *Jurnal Komunitas.* Vol. 2 No. 2.

Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, 2009, "Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi", *Journal Center for International Forestry Research*, No.29b

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siti Nimrah dan Sakaria, “Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik”, *Jurnal The Politik*, UNHAS, Vol 1,No 2

Hidayati, Alif. “Implementasi Kuota 30% calon anggota legislatif perempuan di gresik pada pemilu tahun 2014”, *Al Daulah*, Vol 4, No 2.

Rosidawati, Imas. 2004. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik*

Idris, N. “Perempuan Minangkabau Dalam Politik”, *Jurnal Humaniora*, Vol 22, No 2

UNDP. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan, *Makalah Kebijakan*, Jakarta.

INTERNET :

Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015

Id.m.Wikipedia.org/wiki/Sunan Gresik. 12 Juli 2019

Gresikkab.go.id/Profil/Sejarah. 13 Juli 2019

Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

Kpud-gresikkab.go.id

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU 2014 & 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id